KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK									
			H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 7 2 5				H.4 X Final	
			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
A. IDENTIT	AS PENERIM	A PENGHASILA	N YANG	DIPOTONG					
A.1 NPWP : 1 4 3 5 6 9 3 6 6 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 Nama	3 Nama : DENNY JEFFRY ROTINSULU								
B. PPh PAS	SAL 21 YANG	DIPOTONG							
MASA PA	1.000	OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1		B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	2	1-402-01		22.778.800	22.778.800	0	15	3.416.820	
Keterangan	Kode Objek Pa	j ak : Ho	nor dan	Imbalan Lain yang Di	ibebankan kepada APBN atau	APBD yang Diter	ima oleh PN	IS, Anggota	
Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 046/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022									
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
Nomo	Nomor : Tanggal dd mm yyyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11	B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTIT	AS PEMOTO	NG PAJAK							
C.1 NPWI	P Instansi Pem	erintah :	9 5	3 3 5 0	1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR									
C.3 ID Su	C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4 Tanggal :		2 8	2 8 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.5 Nama Penandatangan :			HARI	HARI JUMADI					
C.6 Perny	6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							ı benar dan telah saya	
[] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	l berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	t mengatur bahwa d	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

NN89GH7P